

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II JI. SALEMBA RAYA NO.28 JAKARTA PUSAT 10430 Telp. (021) 3100311 email: pfm.kota@kemsos.go.id

Nomor

:1808 /4.3 /BS.02/10/2019

Jakarta, 21 Oktober 2019

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) rangkap

Perihal

: Penetapan Jumlah Kuota Kabupaten/Kota

Kegiatan KUBE, RTLH dan SARLING TA 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi (daftar terlampir)

2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

Menyusul surat kami Nomor: 1540/4.3 /BS.02/09/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Penyampaian Usulan Bansos Tahun 2020, bersama ini dengan hormat disampaikan Penetapan Kuota bantuan sosial KUBE, RS-RTLH dan SARLING Tahun Anggaran 2020. Kuota ini ditetapkan berdasarkan usulan yang telah kami terima dengan mempertimbangkan : Prosentase Angka Kemiskinan BPS Tahun 2018, Pendapatan Domestik Regional Bruto BPS 2018 dan Perhatian Pemerintah daerah dalam Penanganan Kemiskinan, serta Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Prioritas Nasional 1 adalah Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Target Pembangunan Tahun 2020 tingkat kemiskinan adalah 8,5 - 9,0%. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan upaya yang konkrit berkesinambungan. Bersama ini dengan hormat disampaikan KUOTA bantuan sosial UEP KUBE, RTLH dan SARLING Tahun Anggaran 2020 (terlampir). Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, dimohon bantuannya mempersiapkan hal sebagai berikut:

- Proposal bantuan sosial KUBE, RTLH dan SARLING TA 2020 sesuai dengan jumlah KUOTA Tahun 2020 yang telah dilengkapi dengan lampiran: (a) FC KTP dan KK, (b) FC kartu PKH/KKS (jika ada), (c) Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, (d) BNBA sesuai Format, (e) Rencana Anggaran Biaya/RAB, (f) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak/SPTJM bermaterai Rp6.000,- sesuai format (g) Surat Pernyataan menerima program bermaterai Rp6.000,- sesuai format (h) tambahan untuk RS-RTLH: foto rumah, bukti kepemilikan tanah.
- Dokumen proposal ASLI disimpan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai bahan saat Audit. Sedangkan proposal hasil Scan disampaikan ke Dit. PFM Wilayah II melalui email: bansos2020subdit1wil2@gmail.com

3. Sasaran calon KPM sesuai dgn Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan lokasi sesuai dengan Kuota. Apabila terdapat perubahan pada proposal untuk TA. 2020 khususnya pada BNBA akibat verval Data Siks-NG, agar segera dilakukan penyesuaian data dan disampaikan pada Dit. PFM Wilayah II.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih terima kasih.

Direktur

Penanganan Fakir Miskin Wilayah II

WAYAN WIRAWAN

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II JI. SALEMBA RAYA NO.28 JAKARTA PUSAT 10430

Telp. (021) 3100311 email: pfm.kota@kemsos.go.id

Nomor

: 1868 /4.3 /BS.02/10/2019

Jakarta, 21 Oktober 2019

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) rangkap

Perihal

: Penetapan Jumlah Kuota Kabupaten/Kota Kegiatan

KUBE TA 2020.

KepadaYth.

- 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi:
 - 1. DKI Jakarta
 - 2. Banten
 - 3. Jawa Tengah
 - 4. D.I Yogyakarta
 - 5. Kalimantan Barat
 - 6. Kalimantan Tengah
 - 7. Kalimantan Selatan
 - 8. Kalimantan Timur
 - 9. Kalimantan Utara
 - 10. Bali
 - 11. Nusa Tenggara Barat
 - 12. Nusa Tenggara Timur
- 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota:
 - 1. Kota Jakarta Timur
 - 2. Kota Jakarta Selatan
 - 3. Kota Jakarta Pusat
 - 4. Kabupaten Lebak
 - 5. Kabupaten Cilacap
 - 6. Kabupaten Banyumas
 - 7. Kabupaten Purbalingga
 - 8. Kabupaten Banjarnegara
 - 9. Kabupaten Kebumen
 - 10. Kabupaten Purworejo
 - 11. Kabupaten Wonosobo
 - 12. Kabupaten Boyolali
 - 13. Kabupaten Klaten
 - 14. Kabupaten Wonogiri
 - 15. Kabupaten Karanganyar
 - 16. Kabupaten Sragen
 - 17. Kabupaten Grobogan
 - 18. Kabupaten Blora
 - 19. Kabupaten Rembang
 - 20. Kabupaten Demak
 - 21. Kabupaten Temanggung
 - 22. Kabupaten Batang
 - 23. Kabupaten Pekalongan
 - 24. Kabupaten Pemalang

- 25. Kabupaten Tegal
- 26. Kabupaten Brebes
- 27. Kota Tegal
- 28. Kabupaten Kulonprogo
- 29. Kabupaten Bantul
- 30. Kabupaten Sambas
- 31. Kabupaten Kapuas Hulu
- 32. Kabupaten Melawi
- 33. Kabupaten Kayong Utara
- 34. Kabupaten Lamandau
- 35. Kabupaten Tanah Laut
- 36. Kabupaten Barito Kuala
- 37. Kabupaten Tabalong
- 38. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 39. Kota Tarakan
- 40. Kabupaten Jembrana
- 41. Kabupaten Buleleng
- 42. Kabupaten Gianyar
- 43. Kabupaten Klungkung
- 44. Kabupaten Bangli
- 45. Kabupaten Karang Asem
- 46. Kabupaten Lombok Barat
- 47. Kabupaten Lombok Tengah
- 48. Kabupaten Sumbawa
- 49. Kabupaten Dompu
- 50. Kabupaten Bima
- 51. Kabupaten Sumbawa Barat
- 52. Kabupaten Lombok Utara
- 53. Kota Mataram
- 54. Kabupaten Kupang
- 55. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 56. Kabupaten Sumba Barat
- 57. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 58. Kabupaten Alor
- 59. Kabupaten Ende
- 60. Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

:Bal14.3 /BS.02/10/2019

Sifat

: Penting

Lampiran : 1 (satu) rangkap

: Penetapan Jumlah Kuota Kabupaten/Kota Bansos KUBE, RTLH dan SARLING TA 2020

DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II DAFTAR KUOTA KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020

No.	PROVINSI	NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KUOTA UEP KUBE
	DIVI IAKADTA			OLF KOBE
1	DKI JAKARTA	1	Kota Jakarta Timur	10
	DKI JAKARTA	2	Kota Jakarta Selatan	10
	DKI JAKARTA	3	Kota Jakarta Pusat	20
2	BANTEN	4	Kabupaten Lebak	100
	JAWA TENGAH	5	Kabupaten Cilacap	80
	JAWA TENGAH	6	Kabupaten Banyumas	150
	JAWA TENGAH	7	Kabupaten Purbalingga	- 60
	JAWA TENGAH	8	Kabupaten Banjarnegara	40
	JAWA TENGAH	9	Kabupaten Kebumen	130
	JAWA TENGAH	10	Kabupaten Purworejo	150
	JAWA TENGAH	11	Kabupaten Wonosobo	100
	JAWA TENGAH	12	Kabupaten Boyolali	40
	JAWA TENGAH	13	Kabupaten Klaten	90
	JAWA TENGAH	14	Kabupaten Wonogiri	90
	JAWA TENGAH	15	Kabupaten Karanganyar	120
3	JAWA TENGAH	16	Kabupaten Sragen	20
	JAWA TENGAH	17	Kabupaten Grobogan	60
	JAWA TENGAH	18	Kabupaten Blora	20
	JAWA TENGAH	19	Kabupaten Rembang	80
	JAWA TENGAH	20	Kabupaten Demak	150
	JAWA TENGAH	21	Kabupaten Temanggung	10
	JAWA TENGAH	22	Kabupaten Batang	50
	JAWA TENGAH	23	Kabupaten Pekalongan	10
	JAWA TENGAH	24	Kabupaten Pemalang	90
	JAWA TENGAH	25	Kabupaten Tegal	60
	JAWA TENGAH	26	Kabupaten Brebes	120
	JAWA TENGAH	27	Kota Tegal	20
4	D.I YOGYAKARTA	28	Kabupaten Kulonprogo	100
	D.I YOGYAKARTA	29	Kabupaten Bantul	120
5	KALIMANTAN BARAT	30	Kabupaten Sambas	30
	KALIMANTAN BARAT	31	Kabupaten Kapuas Hulu	20
	KALIMANTAN BARAT	32	Kabupaten Melawi	80
	KALIMANTAN BARAT	33	Kabupaten Kayong Utara	100
6	KALIMANTAN TENGAH	34	Kabupaten Lamandau	30
7	KALIMANTAN SELATAN	35	Kabupaten Tanah Laut	70
	KALIMANTAN SELATAN	36	Kabupaten Barito Kuala	80
	KALIMANTAN SELATAN	37	Kabupaten Tabalong	100
8	KALIMANTAN TIMUR	38	Kutai Kartanegara	50
9	KALIMANTAN UTARA	39	Kota Tarakan	60

	T		T	Lanjutan halaman
10	BALI	40	Kabupaten Jembrana	100
	BALI	41	Kabupaten Buleleng	80
	BALI	42	Kabupaten Gianyar	80
	BALI	43	Kabupaten Klungkung	70
	BALI	44	Kabupaten Bangli	100
	BALI	45	Kabupaten Karang Asem	150
11	NUSA TENGGARA BARAT	46	Kabupaten Lombok Barat	100
	NUSA TENGGARA BARAT	47	Kabupaten Lombok Tengah	100
	NUSA TENGGARA BARAT	48	Kabupaten Sumbawa	50
	NUSA TENGGARA BARAT	49	Kabupaten Dompu	10
	NUSA TENGGARA BARAT	50	Kabupaten Bima	150
	NUSA TENGGARA BARAT	51	Kabupaten Sumbawa Barat	100
	NUSA TENGGARA BARAT	52	Kabupaten Lombok Utara	40
	NUSA TENGGARA BARAT	53	Kota Mataram	40
12	NUSA TENGGARA TIMUR	54	Kabupaten Kupang	70
	NUSA TENGGARA TIMUR	55	Kabupaten Timur Tengah Selatan	90
	NUSA TENGGARA TIMUR	56	Kabupaten Sumba Barat	80
	NUSA TENGGARA TIMUR	57	Kabupaten Timur Tengah Utara	30
	NUSA TENGGARA TIMUR	58	Kabupaten Alor	80
	NUSA TENGGARA TIMUR	59	Kabupaten Ende	110
	NUSA TENGGARA TIMUR	60	Kabupaten Sabu Raijua	150
		4.500		

Jakarta, 2/ Oktober 2019

DIREKTUR PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II

I WAYAN WIRAWAN